

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang mengangkat masalah pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Abrar (2010) meneliti tentang bagaimana pengaruh belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi serta bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemandirian daerah. Penelitian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui besarnya dampak belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan untuk mengetahui dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemandirian daerah. Variabel dalam penelitian tersebut adalah pendapatan asli daerah (PAD), belanja pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Setelah dilakukan prosedur statistik dengan menggunakan metode analisis regresi linier sederhana, maka hasil penelitian menyatakan bahwa adanya peningkatan penerimaan pajak daerah yang disebabkan oleh penambahan jumlah objek pajak berdampak pada penerimaan daerah, selain penerimaan dari retribusi dan zakat yang juga memiliki prospek cukup baik. Namun, perlu diwaspadai perolehan PAD di provinsi Aceh justru memberikan dampak yang tidak baik terhadap pertumbuhan ekonomi sebab di tahun mendatang kondisi tersebut terlihat semakin menurun. Berbeda dengan PAD, belanja pembangunan justru mampu meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB) provinsi Aceh sebab belanja tersebut lebih diprioritaskan untuk sektor-sektor yang lebih mendomi-

nasi kepentingan publik, seperti sektor jasa dan perdagangan serta untuk pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan demi meningkatkan daya tarik investasi yang berujung pada peningkatan kemandirian daerah. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah meskipun belanja modal memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi namun perlu diwaspadai posisinya di masa depan. Alangkah lebih baik berbagai belanja yang dilakukan pemerintah hendaknya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Pada penelitian Bati (2009) permasalahan yang diteliti adalah apakah belanja modal dan pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara sehingga dapat diketahui ada tidaknya pengaruh belanja modal dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Pada penelitian ini menggunakan metode regresi berganda karena variabel independen lebih dari satu. Hasil penelitian membuktikan bahwa belanja modal yang digunakan untuk menyediakan infrastruktur di berbagai sektor, seperti: sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain menyebabkan produktifitas masyarakat semakin tinggi karena masyarakat merasa nyaman dan dapat menjalankan kegiatannya. Selain itu, investor juga akan tertarik dengan daerah yang memiliki fasilitas memadai. Dengan bertambahnya produktifitas masyarakat dan investor yang berada di daerah tersebut akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) seperti: pajak daerah dan retribusi daerah sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan perkapita. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah alangkah

lebih baik berbagai belanja yang dialokasikan oleh pemerintah hendaknya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, misalnya pungutan yang bersifat retribusi sebab pungutan tersebut berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkaitan dengan peningkatan produksi barang jasa dapat terwujud.

Penelitian Adi (2006) permasalahan yang diteliti adalah bagaimanakah dampak belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemandirian daerah serta dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemandirian daerah. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk menguji dampak perubahan struktur pengeluaran baik untuk pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan asli daerah (PAD) serta untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung perubahan belanja modal untuk pendapatan asli daerah (PAD). Variabel yang diteliti meliputi belanja modal, pendapatan asli daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur yang digunakan untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung sebuah variabel terhadap variabel lain. Hasil penelitian menyatakan bahwa untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) maka pemerintah daerah harus memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor unggulan atau yang mendominasi kegiatan publik, seperti: sektor jasa dan perdagangan serta membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan tersebut akan berdampak pada peningkatan kemandirian daerah. Di samping itu, pemerintah daerah harus lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal, misal dengan memberikan peluang yang

lebih luas kepada investor. Tingginya aktivitas tersebut akan memberikan tambahan penerimaan daerah setempat sehingga berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah pemerintah daerah harus mengurangi ketergantungan dana dari pemerintah pusat sebab tingginya transfer dana dari pemerintah pusat justru menyebabkan rendahnya inisiatif pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Sitompul (2007) meneliti tentang analisis pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap PDRB Sumatera Utara. Permasalahan dalam penelitian tersebut adalah bagaimana pengaruh investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN), investasi penanaman modal asing (PMA), jumlah tenaga kerja dan kondisi perekonomian Indonesia terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Sumatera Utara. Tujuan yang ingin di capai adalah untuk menganalisis pengaruh penanaman modal dalam negeri (PMDN), penanaman modal asing (PMA), jumlah tenaga kerja dan kondisi perekonomian Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDRB) Sumatera Utara. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan variabel yang terdiri dari penanaman modal dalam negeri (PMDN), penanaman modal asing (PMA), jumlah tenaga kerja dan produk domestik regional bruto (PDRB). Hasil penelitian menyatakan bahwa investasi merupakan kata kunci penentu laju pertumbuhan ekonomi karena disamping akan mendorong kenaikan output atau produksi juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan barang dan jasa sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya pendapatan masyarakat. Di samping itu, PDRB Sumatera Utara yang di-

pengaruhi oleh tiga sektor utama, yakni sektor pertanian, industri dan perdagangan, hotel dan restoran mampu memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan PDRB Sumatera Utara. Begitu juga dengan tenaga kerja yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sebab posisi tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi yang menggerakkan perekonomian di daerah. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah peningkatan jumlah investasi harus terus dilakukan sebab hal tersebut yang akan berdampak pada jumlah tenaga kerja dan pada gilirannya akan meningkatkan PDRB.

Astuti (2007) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui prediksi produk domestik regional bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, kebutuhan investasi dan penambahan tenaga kerja di Kabupaten Sleman pada tahun 2005-2009. Metode analisis yang digunakan adalah analisis tren yaitu metode analisis yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang dan variabel yang digunakan adalah produk domestik regional bruto (PDRB), jumlah investasi dan tenaga kerja, angka incremental capital output ratio (ICOR) dan angka capital labor ratio (ILOR) sebagai parameter untuk mengetahui kebutuhan investasi dan tenaga kerja di masa yang akan datang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi angka ICOR maka kebutuhan investasi semakin besar, begitu juga sebaliknya. Di sisi lain, perekonomian di Kabupaten Sleman sangat didominasi oleh empat sektor yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel, restoran dan sektor jasa-jasa akan menambah kesempatan kerja baru. Sektor yang mempunyai angka ILOR negatif berarti bahwa kenaikan PDRB di sektor tersebut justru mengurangi

kesempatan kerja yang ada. Hal ini karena meningkatnya produktivitas tenaga kerja atau proses produksi yang padat modal. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan melihat besarnya angka ILOR dan ICOR, maka pemerintah seharusnya dapat memprediksi berapa besarnya investasi maupun tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Maka dari itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi investasi serta strategi alokasi investasi yang lebih diprioritaskan pada sektor yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki perbedaan dalam hal variabel, periode penelitian dan lokasi penelitian. Variabel yang diteliti merupakan gabungan dari variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu. Selain itu, pada penelitian kali ini menggunakan empat variabel yaitu pendapatan asli daerah (PAD), belanja modal, investasi dan tenaga kerja dengan tujuan untuk menguji ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel terhadap pertumbuhan ekonomi. Periode yang digunakan yakni tahun 2010-2011 yang memungkinkan diperolehnya data terbaru sehingga diharapkan penelitian ini sesuai dengan kondisi saat ini serta didasarkan pada kebutuhan data yang akan digunakan dalam analisis data.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2007;96) pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli

daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu:

1. Pajak daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia no 28 tahun 2009 pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Pajak provinsi terdiri dari: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.
- b) Pajak kabupaten/kota terdiri dari: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2. Retribusi daerah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia no 28 tahun 2009 retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Objek retribusi dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a) Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat

dinikmati oleh orang pribadi atau badan, seperti: retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan atau kebersihan, penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta, penyediaan atau penyedotan kakus, pengolahan limbah cair, pelayanan tera atau teraulang, pelayanan pendidikan dan pengendalian menara telekomunikasi.

- b) Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, seperti: pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis retribusi jasa usaha adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan atau pertokoan, tempat pelelangan, terminal, tempat khusus parkir, tempat penginapan, rumah potong hewan, pelayanan kepelabuhan, tempat rekreasi dan Olahraga, penyeberangan di air dan penjualan produksi usaha daerah.
- c) Retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis

retribusi perizinan tertentu adalah retribusi izin mendirikan bangunan, izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin gangguan, izin trayek dan izin usaha perikanan.

3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.

Menurut Halim (2007;98) hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN
- c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

4. Lain-lain PAD yang sah.

Menurut Halim (2007;98) pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- a) Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan
- b) Jasa giro dan pendapatan bunga
- c) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat penjualan pengadaan barang dan jasa oleh daerah serta penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap uang asing

d) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan.

Menurut penelitian Simanjuntak (2006) ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah secara maksimal yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi. Salah satu wujud nyata dari kegiatan intensifikasi ini untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin, maka target penerimaan bisa mendekati potensinya. Sedangkan cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalian sumber-sumber objek retribusi atau pajak ataupun menjangkau wajib pajak baru.

Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang sesuai dengan potensi masing-masing daerah seharusnya dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah. Sumber penerimaan PAD yang paling banyak bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. (Suparmoko, 2002;60).

Suatu daerah tidak akan berhasil bila daerah tersebut tidak mengalami pertumbuhan ekonomi meskipun terjadi peningkatan penerimaan PAD. Alangkah lebih baik, optimalisasi penerimaan PAD hendaknya didukung dengan upaya pemerintah daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik. Keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak hanya diukur dengan jumlah yang diterima tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat

agar dapat lebih berkembang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah (Bati, 2006).

2.2.2 Belanja Modal

Menurut Halim (2007;101) belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal termasuk:

- a) Belanja tanah
- b) Belanja peralatan dan mesin
- c) Belanja modal gedung dan bangunan
- d) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan
- e) Belanja aset tetap lainnya
- f) Belanja aset lainnya

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Anggaran) belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Belanja modal adalah belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, misalnya untuk pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, dll untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat

bisa menikmati manfaat dari pembangunan tersebut. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas di berbagai sektor. Produktifitas masyarakat diharapkan semakin meningkat sehingga berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi (Bati, 2009).

Menurut penelitian Abdullah (2006) aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran pendapatan belanja modal (APBD). Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Menurut penelitian Abrar (2010) belanja daerah harus diarahkan kepada peningkatan proporsi belanja yang berpihak untuk kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas serta penghematan yang dilakukan dengan cara penganggaran belanja yang mengacu pada penyusunan anggaran berbasis kinerja sesuai dengan prioritas program kegiatan.

2.2.3 Investasi

Menurut Noor (2007;432) investasi adalah kegiatan mengalokasikan atau menanamkan sumber daya saat ini (sekarang, present), dengan harapan mendapatkan manfaat (di kemudian hari, future). Investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Selain dapat menambah penghasilan seseorang, investasi juga membawa risiko keuangan jika investasi tersebut gagal. Kegagalan investasi disebabkan oleh banyak hal, diantaranya adalah faktor keamanan, baik dari bencana alam atau diakibatkan faktor manusia dan lain-lain.

Menurut penelitian Sitompul (2007) berdasarkan sumber modalnya, investasi dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia. Penanaman modal dalam negeri bisa juga diartikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
- b) Penanaman Modal Asing (PMA) meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.

Menurut data informasi badan koordinasi penanaman modal (BKPM) terdapat tiga sektor atau kegiatan yang dapat dilakukan untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA), yaitu:

- a) Sektor primer, meliputi kegiatan penanaman modal yang berkaitan dengan usaha tanaman pangan dan perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan pertambangan.
- b) Sektor sekunder, meliputi kegiatan penanaman modal yang berkaitan dengan usaha industri makanan, industri tekstil, industri kayu, industri karet dan plastik, industri logam, mesin dan elektronik, dan lain-lain
- c) Sektor tersier, meliputi kegiatan penanaman modal yang berkaitan dengan jasa seperti penyediaan listrik, gas dan air, perdagangan dan reparasi, hotel dan restoran, jasa, dan lain-lain.

Menurut Dumairy (1996;134) penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan produksi. Dengan posisi semacam ini, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lesunya pembangunan. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang menggairahkan investasi. Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri tetapi juga investor asing, begitu juga halnya Indonesia.

Banyak negara yang melakukan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan investasi baik domestik ataupun modal asing. Hal ini dilakukan oleh pemerintah karena kegiatan investasi akan mendorong kegiatan ekonomi suatu

negara, penyerapan tenaga kerja, peningkatan output yang dihasilkan, dan lain-lain. Menurut penelitian Nusantara (2001) masih tertinggalnya perekonomian Indonesia pada awal orde baru mendorong pemerintah untuk mencari sumber pembiayaan pembangunan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Investasi asing bagi Indonesia merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan dalam proses pembangunan di Indonesia.

Negara-negara berkembang seperti Indonesia mempunyai sumber alam yang belum dikembangkan dan sumber daya manusia yang masih potensial. Jumlah angkatan kerja yang terus meningkat tidak sebanding dengan pertumbuhan sektor-sektor pembangunan. Namun, dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, Indonesia melaksanakan pembangunan di berbagai sektor yang akan berdampak pada perluasan kesempatan kerja. Hal ini berarti bahwa harus dilakukan investasi yang besar agar dapat memperluas kesempatan kerja. Oleh karena itu untuk meningkatkan produktivitas maka perlu mempercepat investasi baru dalam barang-barang modal fisik dan pengembangan sumberdaya manusia, baik investasi di bidang pendidikan ataupun pelatihan (Sitompul, 2007).

2.2.4 Tenaga Kerja

Menurut Dumairy (1996;74) tenaga kerja adalah penduduk yang mempunyai umur didalam batas usia kerja. Setiap negara memilih batas umur yang berbeda karena situasi tenaga kerja pada masing-masing negara juga berbeda sehingga batasan usia kerja antar negara menjadi tidak sama. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap

orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Terdapat banyak pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini, ada yang menyebutkan di atas 17 tahun ada pula yang menyebutkan di atas 20 tahun, bahkan ada yang menyebutkan di atas tujuh tahun karena seperti yang kita tahu anak-anak jalanan sudah termasuk tenaga kerja.

Menurut Suroso (2004;110) tenaga kerja dibagi menjadi dua kelompok yaitu:

- a) Angkatan kerja, yaitu tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara tidak bekerja dan yang mencari pekerjaan.
- b) Bukan angkatan kerja, yaitu tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan, yakni orang-orang yang kegiatannya bersekolah (mahasiswa), mengurus rumah tangga (ibu-ibu yang bukan wanita karier) serta menerima pendapatan tapi bukan merupakan imbalan langsung atas jasa kerjanya (pensiunan, penderita cacat yang dependen).

Menurut penelitian Sitompul (2007) tenaga kerja dipandang sebagai suatu faktor produksi yang mampu untuk meningkatkan daya guna produksi lainnya (mengolah tanah, memanfaatkan modal, dan lain-lain) sehingga perusahaan memandang tenaga kerja sebagai suatu investasi dan banyak perusahaan yang memberikan pendidikan kepada karyawannya.

Angkatan kerja yang tumbuh sangat cepat tentu saja akan membawa beban tersendiri bagi perekonomian yakni penciptaan atau perluasan lapangan kerja. Jika

lowongan kerja baru tidak mampu menampung semua angkatan kerja baru, dengan kata lain tambahan permintaan akan tenaga kerja lebih sedikit daripada tambahan penawaran tenaga kerja, maka sebagian angkatan kerja baru itu akan memperpanjang barisan penganggur yang sudah ada. Penciptaan lapangan kerja inilah yang menjadi salah satu masalah dalam pembangunan ekonomi. Di sisi lain, mutu atau kualitas tenaga kerja Indonesia masih perlu dipertanyakan, sebagaimana tercermin dari tingkat pendidikan angkatan kerja dan produktifitas masih relatif rendah (Dumairy, 1996;77). Menurut Noor (2007;468) salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah adalah seberapa banyak lapangan pekerjaan yang bias diciptakan untuk rakyatnya. Dengan kata lain, keberhasilan pemerintah diukur antara lain seberapa kecil tingkat pengangguran yang terjadi di masyarakatnya.

2.2.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sadono, 1994;10). Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat daerah atau suatu wilayah (Bati, 2009). Menurut penelitian Abrar (2010) produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan suatu indikator yang menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan

atau balas jasa suatu faktor produksi di suatu daerah. Sedangkan menurut penelitian Simanjuntak (2006) produk domestik regional bruto (PDRB) adalah total output daerah yang dihasilkan setiap tahunnya berdasarkan harga berlaku.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau daerah. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik (Astuti, 2007).

Menurut Noor (2007;490) harga berlaku (current price) sering digunakan dalam menganalisis perkembangan ekonomi suatu wilayah atau negara. Penggunaan harga berlaku bertujuan untuk melihat nilai sebenarnya dari aktivitas ekonomi yang berlaku saat itu. Misalnya nilai aktivitas ekonomi yang terjadi tahun 2000 digunakan harga yang berlaku 2000.

Berdasarkan musyawarah perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2012, presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu sangat penting karena jika ekonomi tumbuh, maka pengangguran akan berkurang sehingga hal tersebut berdampak pada penurunan kemiskinan serta jika ekonomi dan dunia usaha tumbuh, maka negara atau pemerintah

mendapatkan penerimaan yang lebih banyak terutama untuk membiayai pembangunan dan kehidupan bernegara. Maka dari itu, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah peningkatan investasi; peningkatan ekspor; peningkatan belanja pemerintah; kecukupan rakyat/rumah tangga untuk mencukupi/membeli kebutuhannya (konsumsinya); dan peningkatan pembangunan infrastruktur.

Menurut Meryana (2012) dalam Jakarta Kompas mengatakan bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah lebih baik dari tahun sebelumnya, namun tetap harus ditingkatkan kualitasnya agar indikator-indikator yang telah ditetapkan dapat terwujud. Cara meningkatkan kualitas tersebut adalah seluruh petinggi pemerintah dari pusat hingga daerah harus lebih solid dan kompak. Sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, pengolahan, dan infrastruktur, yang padat karya harus terus dikembangkan. Berikut ini beberapa indikator untuk melihat apakah pertumbuhan ekonomi Indonesia berkualitas atau tidak adalah:

- a) angka pengangguran dan kemiskinan semakin berkurang
- b) angka kriminalitas serta gejolak sosial dan politik semakin menurun
- c) indeks kepuasan masyarakat naik
- d) berkurangnya unjuk rasa anarkis menuntut kenaikan upah
- e) angka kematian ibu dan balita berkurang
- f) tingkat melek huruf dan kualitas pendidikan membaik

Menurut penelitian Sitompul (2007) dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, Indonesia melaksanakan pembangunan di berbagai sektor, khususnya sektor industri yang diharapkan mampu mengurangi peran

sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Peran sektor industri sangat diharapkan karena sektor ini mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sektor pertanian. Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pengertian pertumbuhan ekonomi sering dibedakan dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bersangkutan paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat, sementara pembangunan mengandung arti yang lebih luas. Proses pembangunan mencakup perubahan pada komposisi produksi, perubahan pada pola penggunaan (alokasi) sumber daya produksi diantara sektor-sektor kegiatan ekonomi, perubahan pada pola distribusi kekayaan dan pendapatan diantara berbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kerangka kelembagaan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh (Bati, 2009).

Pertumbuhan ekonomi disuatu negara bisa disebabkan oleh banyak faktor. Bagi negara-negara maju, mereka bisa mengandalkan hasil produksi barang dan jasa mereka tetapi tidak menutup kemungkinan pula adanya pinjaman yang mereka lakukan serta adanya investasi. Tapi bagi negara-negara yang sedang berkembang tentu saja akan sulit atau bisa dikatakan tidak mudah jika harus mengandalkan faktor produksi barang dan jasa, maka dari itu faktor – faktor lain sangat menentukan, seperti halnya pinjaman dan investasi.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup diandalkan di daerah karena digali sendiri oleh Pemerintah Daerah. Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih banyak dan tingkat kemandirian akan meningkat pula sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk menggali potensi-potensi daerah (Andriansya, Agis dan Afif Sulfa). PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Bati (2009) yang mengatakan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) akan merangsang pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan publik sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita.

Menurut penelitian Simanjuntak (2006) dalam era otonomi daerah diharapkan pendapatan asli daerah (PAD) mampu menjadi sumber pembiayaan daerah sehingga mampu membiayai sendiri pembangunan daerah yang pada akhirnya mampu mengurangi ketergantungan pemerintah pusat. Dengan demikian, di tahun mendatang diharapkan kontribusi PAD terus mengalami peningkatan dan kemandirian daerah. Hal tersebut dapat memberikan gambaran bahwa kontribusi PAD memiliki peranan yang begitu besar dan pada akhirnya akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.3.2 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif atau sektor-sektor yang lebih mendominasi kegiatan masyarakat (Adi, 2006). Hal tersebut sejalan dengan penelitian Abrar (2010) mengatakan bahwa belanja pembangunan justru mampu meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB) provinsi Aceh sebab belanja tersebut lebih diprioritaskan untuk sektor-sektor yang lebih mendominasi kepentingan publik, seperti sektor jasa dan perdagangan.

Menurut Bati (2009) dengan adanya belanja modal yang digunakan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur, khususnya pembangunan dalam sektor pelayanan publik akan menarik masyarakat untuk lebih aktif bekerja karena tersedianya fasilitas yang memadai, selain itu investor juga akan tertarik untuk membuka usaha di daerah yang memiliki fasilitas yang memadai. Jika produktivitas masyarakat dan investor meningkat, maka pemerintah daerah akan lebih berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat sehingga akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi seiring dengan meningkatkan pendapatan per kapita.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H2 : Belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.3.3 Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Frete (2007) meneliti tentang analisis tentang pengaruh investasi terhadap pembangunan ekonomi di provinsi Papua yang mengatakan bahwa untuk mendorong pembangunan ekonomi, salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah mendorong para investor, baik investor lokal maupun investor asing untuk melakukan investasi di Provinsi Papua dan diharapkan dapat memberikan peningkatan pendapatan bagi daerah. Menurut penelitian Sitompul (2007) investasi merupakan kata kunci penentu laju pertumbuhan ekonomi karena disamping akan mendorong kenaikan output atau produksi juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan barang dan jasa sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya pendapatan masyarakat dan pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi (Abrar, 2010). Menurut Noor (2007;494) investasi adalah awal dari berbagai kegiatan ekonomi. Jika kegiatan investasi berkembang dengan baik dan efisien maka akan diikuti oleh tumbuhnya kegiatan ekonomi lainnya. Dengan semakin besarnya investasi pemerintah pada barang publik

serta pengalokasian sumber daya yang ada di daerah tersebut secara optimal maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H3 : Investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.3.4 Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut penelitian Sitompul (2007) pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja dianggap sebagai salah satu faktor penting yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar sedangkan jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi. Posisi tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi yang menggerakkan perekonomian di daerah sangatlah penting yang pada gilirannya akan meningkatkan produk domestic regional bruto (PDRB).

Tenaga kerja yang turut serta dalam proses produksi berguna untuk menghasilkan output sehingga jika terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja yang diserap dalam suatu perekonomian daerah diharapkan akan berpengaruh terhadap peningkatan produksi dan berdampak pada peningkatan laju PDRB. Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin besar lapangan kerja yang tersedia maka akan menyebabkan semakin meningkatkan pula total produksi di suatu daerah. Pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja dianggap sebagai faktor positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran (Suparmoko, dkk, 2002;99) yang mengatakan bahwa faktor tenaga kerja merupakan salah satu faktor

penting dalam kaitannya dengan peningkatan produk domestik bruto (PDB) suatu negara atau produk domestik regional bruto (PDRB) suatu daerah.

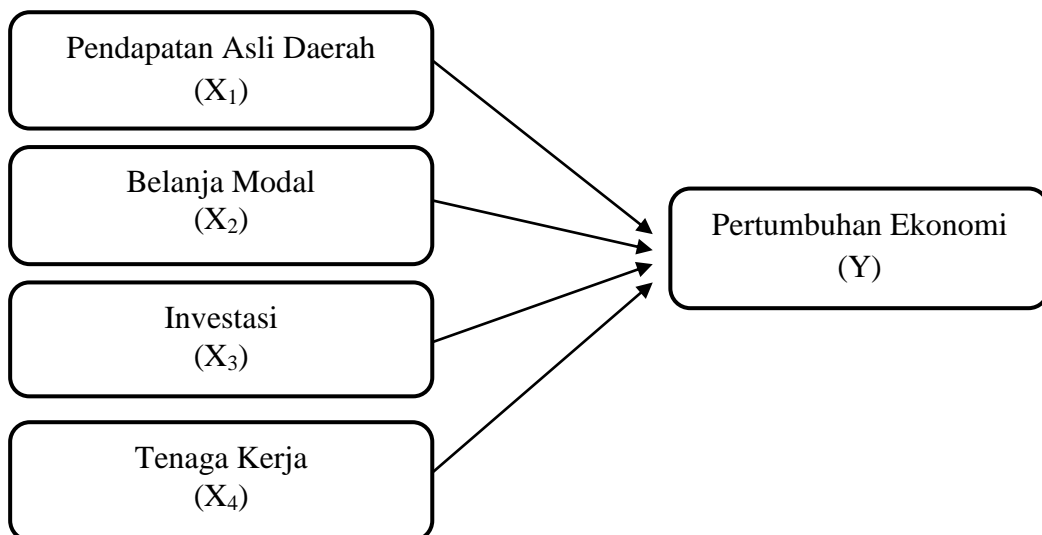
Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H4 : Tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual sepenuhnya hasil dari pemikiran peneliti setelah mengkaji tentang permasalahan peneliti yang akan diteliti, tujuan yang akan dicapai serta kajian pustaka sebagai dasar logika untuk mencari jawaban dari masalah tersebut.

Kerangka konseptual dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



*Gambar 2.1
Kerangka Konseptual*

Dalam alur kerangka konseptual diatas terdapat empat variabel bebas yaitu pendapatan asli daerah (PAD), belanja modal, investasi dan tenaga kerja serta satu variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi. Untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat menggunakan regresi linear berganda.